

Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur

Fazria Bagi¹, Irawaty Igrisa², Romy Tantu³

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo

E-mail: fazria.bagi@gmail.com, irawatyigirisa17@ung.ac.id

Article History:

Received: 07 Juni 2023

Revised: 21 Juni 2023

Accepted: 23 Juni 2023

Keywords: Implementasi Program, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur yang dikaji dari aspek persiapan, penyaluran, dan penggantian KPM. Kemudian faktor-faktor yang menentukan keberhasilan dalam implementasi program bantuan pangan non tunai (BPNT) yang dilihat dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan (1) Proses Implementasi Program bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kelurahan Heledulaa Utara Kecamatan Kota Timur sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Akan tetapi yang masih perlu dibenahi dan diperhatikan yakni dalam proses persiapan, penyaluran dan penggantian KPM. (2) Faktor-faktor yang Menentukan Keberhasilan dalam Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur sudah dilaksanakan dengan baik serta sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun yang masih perlu ditingkatkan dan menjadi perhatian pihak-pihak yang terkait yakni dari faktor komunikasi, sumber daya yang digunakan, disposisi serta struktur birokrasi.

PENDAHULUAN

Bantuan sosial pangan non tunai adalah program bantuan dalam bentuk pangan yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat atau yang disebut dengan KPM, dengan menggunakan mekanisme elektronik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk penyaluran bahan pangan, dengan harapan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Fadlurrohman et al., (2019:123) mengatakan bahwa hal ini diperlukan untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas bantuan sosial pangan bagi keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan dan sudah terdaftar dalam basis data terpadu (BDT). Keluarga penerima manfaat (KPM).

Tabel 1.3
Jumlah Keluarga Penerima Manfaat BPNT Kelurahan Heledulaa Utara

No	Tahun	Penerima
1.	2019	120 KPM
2.	2020	189 KPM
3.	2021	224 KPM
4.	2022	452 KPM
Jumlah		985 KPM

Sumber : Data Kelurahan Heledulaa Utara (2022)

Berdasarkan tabel 1.3 di atas, dijelaskan bahwa jumlah keluarga penerima manfaat BPNT di kelurahan heledulaa utara pada tahun 2019 jumlah penerima ada 120 KPM, pada tahun 2020 meningkat menjadi 189 KPM, pada tahun 2021 meningkat kembali menjadi 224 KPM dan pada tahun 2022 lebih meningkat menjadi 452 KPM. Sehingga jumlah penerima manfaat BPNT di kelurahan heledulaa utara dari tahun 2019 ke tahun 2022 berjumlah 985 KPM.

Keluarga penerima manfaat BPNT mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai dengan sekarang tahun 2022. Jumlah keluarga penerima manfaat semakin meningkat karena adanya perubahan data dan kependudukan masyarakat baik yang meninggal, pindah, dan penduduk baru atau tambahan.

Kemudian, untuk besaran dana BPNT yang diterima oleh keluarga penerima manfaat (KPM) setiap bulannya dari tahun ke tahun mengalami perubahan sesuai dengan kebijakan dari pemerintah. Dapat dilihat pada tabel 1.4 di bawah ini. Jumlah besaran dana BPNT yang diterima pada tahun 2018 sampai 2019 yaitu berjumlah Rp. 110.000/KK, di tahun 2020 pada bulan januari sampai bulan maret besaran yang diterima meningkat yaitu berjumlah Rp. 150.000/KK, kemudian di tahun 2020 pada bulan april sampai dengan sekarang kembali meningkat yaitu berjumlah Rp. 200.000/KK.

Tabel 1.4
Jumlah Besaran Dana BPNT/Bulan

Tahun	Besaran Dana (Rp)
2018-2019	110.000/ KK
2020 (Januari-Maret)	150.000/ KK
2020 (April) s/d sekarang	200.000/ KK

Sumber : Data Kelurahan Heledulaa Utara (2022)

Pelaksanaan program bantuan pangan non tunai di Kelurahan Heledulaa Utara berdasarkan pengamatan peneliti dan keterangan dari beberapa masyarakat penduduk asli di Kelurahan Heledulaa Utara menyatakan program BPNT belum berjalan dengan baik masih terdapat beberapa masalah seperti dalam pendataan. Ada masyarakat yang bisa dikatakan mampu dalam hal ekonomi mendapatkan BPNT sedangkan masyarakat yang masih tergolong kurang mampu tidak mendapat BPNT tersebut. Sehingga program BPNT ini pelaksanaannya masih kurang tepat sasaran. Hal yang sama juga dikatakan oleh TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) Kota Timur dimana pelaksanaan program BPNT di Kelurahan Heledulaa Utara ini masih kurang maksimal dan perlu perbaikan, setelah peneliti turun penelitian di lokasi tersebut.

Kemudian masalah lainnya yang ditemukan dilapangan berdasarkan pernyataan dari

beberapa masyarakat baik yang termasuk KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dan yang bukan KPM yaitu ada beberapa kepala keluarga penerima BPNT yang hanya menerima sekali dua kali saja, untuk berikutnya sudah tidak menerima lagi. Dalam penyaluran dan pembelian barang pangan juga sering terjadi keterlambatan yang menyebabkan penerimaannya tertunda, padahal keluarga penerima manfaat sebagian sudah menerima BPNT tersebut, sehingga muncul tidak meratanya penerimaan BPNT dan kurangnya komunikasi di dalam masyarakat. BPNT juga biasa diterima secara tunai oleh KPM dan itu tanpa diketahui oleh pendamping program BPNT, jadi dapat di katakan perlu adanya pendampingan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap keluarga penerima manfaat BPNT di Kelurahan Heledulaa Utara terutama dalam komunikasi agar harus lebih terjaga agar pelaksanaan penyaluran BPNT bisa terlaksana sesuai prosedur.

Program bantuan pangan non tunai ini seharusnya bisa di manfaatkan sebaik-baiknya agar bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan yang terjadi khususnya di Kelurahan Heledulaa Utara, bukan disalah manfaatkan sehingga tidak adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti yang diharapkan pemerintah.

Berdasarkan penelitian dan permasalahan yang sudah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur”.

LANDASAN TEORI

Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan salah satu komponen negara yang tidak boleh diabaikan. Negara tanpa komponen kebijakan publik dipandang gagal, karena kehidupan bersama hanya diatur oleh seseorang atau sekelompok orang saja, yang bekerja seperti tiran, dengan tujuan untuk memuaskan kepentingan diri atau kelompok saja. Kebijakan publik, termasuk di dalamnya adalah tata kelola negara (*governance*), mengatur interaksi antara negara dengan rakyatnya (Nugroho dalam Handoyo, 2012:6).

Implementasi Kebijakan

Igirisa et al., (2020:2-3) Implementasi kebijakan salah satu mata rantai dalam proses kebijakan, dalam hal ini berupa kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. tanpa implementasi maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan menjadi tidak bermakna. oleh karena itulah implementasi kebijakan mempunyai kedudukan yang penting dalam kebijakan publik. Implementasi kebijakan merupakan bagian dari rangkain dalam pentahapan dalam kebijakan publik, disamping formulasi kebijakan, penilain kebijakan dan lai-lain.

Abdussamad et al., (2021:46) mengemukakan bahwa persyaratan implementasi ini didasarkan pada kebutuhan untuk menganalisis beberapa kebijakan. Kepatuhan kelompok sasaran merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan dilihat dari perspektif perilaku.

Tui (2021:19) mengemukakan “*at the implementation stage, it can also be said to be successful because from the beginning of the formation of the group until the implementation of supervision activities has been carried out properly*”. Pada tahap implementasi juga dapat dikatakan berhasil karena dari awal pembentukan kelompok sampai pelaksanaan supervisi, telah dijalankan dengan benar.

Model George C. Edward III

Edward III (dalam Kusnadi & Baihaqi, 2020:4) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu :

- a. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan keada kelompok sasaran, sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- b. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif.
- c. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga tidak efektif.
- d. Struktur Birokrasi. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi.

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Program Bantuan Pangan Non Tunai merupakan upaya mereformasi Program Subsidi Rastera yang dilaksanakan berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia untuk meningkatkan efektifitas dan ketepatan sasaran program, serta untuk mendorong inklusi keuangan. Penyaluran Bantuan Pangan secara Non Tunai dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2017 pada beberapa daerah terpilih di Indonesia dengan akses dan fasilitas memadai. Selain untuk memberikan pilihan pangan yang lebih luas, penyaluran Bantuan Pangan secara Non Tunai melalui sistem perbankan juga dimaksudkan untuk mendukung perilaku produktif masyarakat melalui fleksibilitas waktu penarikan bantuan dan akumulasi aset melalui kesempatan menabung. Pada akhirnya, penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai diharapkan memberi dampak bagi peningkatan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi penerima manfaat melalui akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan. (Gultom et al., 2021:41)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan alasan penelitian harus terjun ke lapangan untuk menemukan dan melakukan observasi sehingga dapat mengamati langsung keadaan sebenarnya mengenai implementasi program bantuan pangan non tunai (BPNT). Sumber informan dalam penelitian ini adalah Ketua TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), Kesie Kesra, Agen Bri-link dan masyarakat KPM (Keluarga Penerima Manfaat) BPNT. Data dan sumber data. Data primer merupakan data-data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dengan cara langsung dari sumbernya. data sekunder merupakan data yang dikumpulkan peneliti dari semua sumber yang sudah ada, seperti data yang berasal dari dokumen-dokumen dan jurnal penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan:

1. Observasi
Menurut Sugiyono (2019:28) menjelaskan bahwa observasi merupakan kegiatan pemuatan penelitian terhadap suatu objek. Apabila dilihat pada proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dibedakan menjadi partisipan dan non partisipan.
2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dimana pewawancara (peneliti) dalam mengumpulkan data mengajukan suatu pertanyaan kepada yang diwawancarai. (Hamzah, 2021:48)

3. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono (2019:35) adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yaitu :

1. Pengumpulan Data

Mengelola dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkrip wawancara, *men-scanning* materi, mengetik, data lapangan atau memilah-milah dan menyusun data tersebut kedalam jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.

2. Reduksi Data (*Data Reduktion*)

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang, yang tak perlu dan mengorganisasikan data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan menjadi tema.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matrik, network, cart, atau grafis. Pada penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, tabel, bagian dan berubungan antar kategori. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan dan tersusun sehingga semakin mudah di pahami

4. Penarikan kesimpulan (*conclusion Drawing/verivication*)

Kesimpulan merupakan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur

Sesuai dengan tujuan dari penelitian yaitu, untuk meneliti dan mengetahui bagaimana implementasi program bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kelurahan Heledulaa Utara Kecamatan Kota Timur yang dikaji dari tahap persiapan, penyaluran dan pergantian KPM. Pelaksanaan program bantuan ini menggunakan metode yang sudah ditetapkan dalam penelitian ini. Berdasarkan masalah yang ada di lapangan, peneliti berusaha menggali dengan melakukan pengamatan dan juga wawancara langsung dengan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) Kota Timur terkait program bantuan pangan non tunai. Data yang dikumpulkan melalui observasi di lapangan selanjutnya deskripsi peneliti dengan membandingkan teori yang digunakan dalam implementasi kebijakan:

a. Persiapan

Untuk mekanisme pelaksanaan pada tahap persiapan ini merupakan bantuan pangan non tunai yang diberikan langsung kepada masyarakat agar dapat membantu perekonomian masyarakat dan juga untuk ketahanan pangan masyarakat. Tujuan dari pemberian BPNT adalah untuk mengurangi beban pengeluaran KPM BPNT melalui pemenuhan sebagian kebutuhan

pangan, memberikan bahan pangan dengan gizi seimbang kepada KPM BPNT, memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi, dan memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM BPNT dalam memenuhi kebutuhan pangan. Sumber dana ini berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

Salah satu dari tahapan persiapan program bantuan ini yaitu perencanaan. Jadi perencanaan adalah sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelum untuk di siapkan dan dilaksanakan pada suatu periode tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Menurut Siagian et al., (2022:73) menjelaskan perencanaan adalah sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang menyangkut hal-hal yang akan di kerjakan di masa mendatang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan sub fokus ditemukan bahwa implementasi kebijakan program BPNT di kecamatan Kota Timur dapat dari bagaimana tahap persiapan itu dilaksanakan. Pihak pemerintah baik dari kecamatan maupun pemerintah kelurahan memastikan terlebih dahulu persiapan terkait dengan infrastruktur pendukung. Proses tahap persiapan menjadi salah satu implementasi kebijakan program BPNT di setiap kelurahan.

Berdasarkan uraian sebelumnya terkait dengan tahapan persiapan yaitu mempersiapkan brilink-brilink yang bersedia dan sudah ditunjuk untuk menjadi agen penyaluran BPNT, kemudian untuk masyarakat yang menjadi penerima BPNT itu tetap menggunakan data dari program bantuan sebelumnya yaitu Rastra dimana yang terdaftar di DTKS (Data terpadu kesejahteraan Sosial), dengan cara nama-nama masyarakat di usulkan oleh Kelurahan ke Dinas Sosial dan dibuatkan SK oleh Walikota dan dikirim kemudian akan di SK kan oleh Kementrian. Jadi KPM BPNT masyarakatnya itu-itu saja dan setiap tahunnya tidak ada perluasan/penambahan. Kemudian masyarakat yang menerima BPNT ini akan melakukan pembukaan rekening dan akan mendapatkan kartu kombo atau KKS (Kartu keluarga sejahtera) yang berisi saldo yang nantinya saldo tersebut akan dibelanjakan berupa bahan pangan di brilink yang sudah tersedia.

Keterkaitan penelitian ini dengan hasil penelitian Magfiroh (2020) implementasi dilihat dari tahap Persiapan dengan melakukan pendataan, memperisapkan e-warong, pembuatan buku rekening serta pendistribusian KKS pada masyarakat.

Berdasarkan data dari hasil penelitian yang diperoleh peneliti dapat disimpulkan proses persiapan program BPNT oleh pihak pemerintah kelurahan Heledulaa Utara Kecamatan Kota Timur dan masyarakat perlu ada pembenahan, karena pemerintah kelurahan tidak melakukan pendataan kembali, pemerintah kelurahan hanya mengambil data masyarakat dari program bantuan sebelumnya yaitu Rastra yang terdaftar di DTKS (Data terpadu kesejahteraan Sosial), sehingganya adanya ketidak tepatan sasaran dimana masih ada juga masyarakat yang tergolong sudah mampu terdaftar pada keluarga penerima manfaat. Jadi dalam proses persiapan BPNT di kelurahan harus di benahi.

b. Penyaluran

Pelaksanaan penyaluran merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untu melaksnanakan semua rencana persiapan dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaanya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula. Sebagaimana prinsip manajemen dalam proses pelaksanaan ini dilakukan setelah perencanaan

dibuat. Pelaksanaan adalah tahap dilaksanakannya kegiatan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

Berdasarkan pengamatan di lapangan menunjukan bahwa salah satu implementasi kebijakan program BPNT yakni penyaluran yang di lakukan pada masyarakat dimana disesuaikan dengan kebijakan yang ada. Pada awal penyaluran KPM menerima uang sebesar Rp.200.000/perbulan Pemerintah pusat menyediakan Kartu Rekening dalam bentuk Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang diserahkan kepada KPM lewat bank penyalur.

Keterkaitan penelitian ini dengan hasil penelitian Magfiroh (2020) implementasi kebijakan program bantuan dilihat dari tahap penyaluran program BPNT pada masyarakat. Proses penyaluran terkadang di laksanakan secara bertatap muka, dalam penyaluran uang yang ada berjumlah Rp.200.000 yang akan digunakan untuk berbelanja di e-warong/brilink.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa, penyaluran bantuan pangan non tunai di kelurahan Heledulaa Utara Kecamatan Kota timur sudah dilaksanakan dengan baik sebagaimana yang sudah di katakan oleh TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) Kota Timur . Dalam pelaksanaan penyaluran bantuan menurut pemerintah kelurahan sudah sangat baik namun sangat berbeda dengan apa yang di sampaikan masyarakat, yaitu adanya bantuan yang tidak tepat sasaran yang seharusnya mendapatkan bantuan tersebut tetapi tidak mendapatkan bantuan, adanya ketidak tepatan waktu atau keterlambatan dalam penyaluran bantuan sampai 2-3 bulan, dan juga informasi tidak jelas tentang penyaluran, di sampaikan bahwa bantuan tersebut sudah masuk tetapi setelah di cek oleh masyarakat bantuan tersebut belum masuk. Sehingga itu pada tahap penyaluran bantuan ini masih kurang baik, sehingga perlu dibenahi.

c. Penggantian KPM

Penggantian KPM adalah proses pengalihan bantuan jika penerima bantuan tersebut telah dinyatakan meninggal atau telah berpindah dan akan dialihkan kepada orang yang lebih membutuhkan bantuan. Kegiatan penggantian KPM itu di lakukan oleh TKSK Kota Timur dan Kasie kesejahteraan.

Berdasarkan pernyataan yang dikemukakan oleh para informan terkait tentang penggantian KPM menunjukan tahap ini belum maksimal, karena masih ada masyarakat yang belum mengetahui tentang penggantian KPM ini. Jadi informasi dari pemerintah kelurahan masih belum maksimal untuk itu di harapkan kepada pemerintah kelurahan untuk lebih transparan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Maka peneliti menyimpulkan mengenai penggantian KPM akan efektif apabila penggantian KPM lebih di utamakan yang membutuhkan bantuan. Dan juga dibutuhkan ketelitian dalam mengambil keputusan untuk penggantian KPM agar bantuan tersebut tepat sasaran dan tepat guna dan pemerintah di harapkan agar bisa lebih transparan dalam menyapaikan informasi adanya pergantian KPM.

Faktor-faktor yang Menentukan Keberhasilan Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Heledulaa Utara Kecamatan Kota Timur

a. Komunikasi

Komunikasi juga sangat penting dalam faktor-faktor yang menentukan program bantuan pangan non tunai (BPNT) dalam perencanaan, pelaksanaan program ini. Apabila kurangnya komunikasi yang dimiliki oleh setiap orang dapat mempengaruhi kebijakan itu sendiri.

Sesuai dengan hasil temuan dilapangan yang dilihat dari faktor komunikasi bahwa komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan sesuai pernyataan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) Kota Timur mereka melakukan pendampingan setiap tahun dan di adakan BIMTEK sebanyak dua kali, dan setiap penyaluran di dampingi dan adanya perluasan

sebelum menerima KKS dan melakukan Sosialisasi. Akan tetapi berbeda dengan pernyataan yang di sampaikan masyarakat bahwa komunikasi untuk info penyaluran BPNT tidak jelas.

Menurut Edward (dalam Tahir, 2017:61) komunikasi ini munjukan peranan sebagai acuan agar pelaksanaan kebijakan mengetahui apa yang akan dikerjakan. Ini berarti bahwa komunikasi juga dapat dinyatakan dengan perintah dari atasan terhadap pelaksana-pelaksana kebijakan sehingga penerapan kebijakan tidak keluar dari sasaran yang dikehendaki. Komunikasi juga berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi yang berkenaan dengan kebijakan yang ada.

Keterkaitan peneliti dengan hasil penelitian Hayati (2017), bahwa komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus di dikomunikasikan dengan tepat.

Berdasarkan uraian sebelumnya terkait komunikasi masyarakat dan pemerintah kelurahan sebagaimana dikemukakan oleh penerima manfaat, komunikasi yang harus dibangun hanya pada saat perencanaan program saja, tidak ada terbukanya proses penyaluran atau transparansi dalam segi tahapan dana. Dan juga komunikasi mengenai informasi penyaluran tidak jelas sehingga adanya simpang siur antar masyarakat.

b. Sumber Daya

Sumber daya mempunyai peran yang penting dalam implementasi kebijakan. sumber daya merupakan keberhasilan proses implementasi kebijakan yang dipengaruhi dengan memanfaatkan sumber daya manusia, keuangan, waktu dan fasilitas yang dapat mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif. Sumber daya manusia diajukan kepada siapa yang menjalankan pelaksana program di lapangan dan sejauh mana pelaksana memahami tentang tugasnya. Sedangkan sumber daya keuangan (*financial*) dimaksudkan untuk mengetahui dari mana sumber dana yang diperoleh terkait program BPNT. Sumber daya waktu dimaksudkan waktu pelaksanaan. Sumber daya fasilitas terkait ketersediaan yang dibutuhkan untuk proses implementasi kebijakan. Tanpa adanya dukungan sumber daya manusia, sumber daya financial dan sumber daya waktu tentu sebuah kebijakan tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Sumber daya manusia yang paling penting didalam implementasi kebijakan. Dibutuhkan sumber daya yang kompeten didalam pelaksanaan program agar tujuan dari kebijakan dapat tercapai.

Menurut Edward (dalam Tahir, 2017:67) sumber daya mempunyai peran penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif.

Keterkaitan penelitian dengan hasil penelitian Hayati (2017), sumber daya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan.

Terkait pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kelurahan Heledulaa Utara Kecamatan Kota Timur, tentunya keberhasilan pelaksana program tidak terlepas dari aktor-aktor lingkup kelurahan. Aktor pelaksana yang terdiri dari pendamping kelurahan, lurah, pemilik ageng brilink dan masyarakat setempat yang ikut membantu dalam program bantuan pangan non tunai (BPNT) di kelurahan Heledulaa Utara Kecamatan Kota timur. Peran aktor pelaksana tentunya kebijakan tidak akan berjalan dengan baik. Program ini juga yang menentukan sukses

tidaknya adalah pemerintah kelurahan, karena termasuk ikut adil. Sumber daya finansial atau dana program bantuan pangan non tunai ini berasal dari kementerian sosial yang langsung di transfer ke rekening-rekening KPM sebesar Rp. 200.000,/bulan. Untuk sumber daya dana sudah sesuai dengan yang ditentukan dalam pedoman pelaksanaan bantuan pangan non tunai (BPNT) sumber daya waktu untuk pelaksanaan bantuan pangan non tunai belum efektif. Karena uang tersalurkan setiap bulan sering terlambat. Sumber daya fasilitas sendiri sampai saat ini tidak ada kendala yaitu tidak ada gangguan pada ATM brilink, sehingga proses implementasi tidak terganggu. Fasilitas bantuan yang diterima KPM juga kualitasnya bagus, layak untuk dikonsumsi tetapi ada juga pada agen brilink tersebut bahan yang di sediakan tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena kekurangan bahan pokok yang disediakan.

c. Disposisi/Sikap Pelaksana

Disposisi merupakan salah satu faktor penentu suatu keberhasilan dalam kebijakan. Disposisi yaitu sikap pelaksanaan atau watak yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen dan kejujuran dalam menjalankan kebijakan seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan agar proses implementasi kebijakan berjalan sesuai dengan yang diinginkan.

Disposisi juga merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.

Menurut Edward (dalam Tahir, 2017:69) menjelaskan bahwa Disposisi atau sikap pelaksana merupakan faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai studi implementasi kebijakan publik. Jika implementasi kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakannya tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Keterkaitan penelitian ini dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hayati (2017) bahwa pada faktor sikap (disposisi) pelaksana dalam mempengaruhi keberhasilan implementasi program BPNT (bantuan pangan non tunai) dimana sikap pelaksana harus mencermati hal-hal penting yang ada yang ada pada variabel ini.

Berdasarkan uraian sebelumnya terkait dengan disposisi atau sikap pelaksana, pelaksana yang terlibat dalam program ini khususnya dikelurahan Heledulaa Utara Kecamatan Kota Timur sudah menjalankan tugas, pokok dan fungsi masing-masing. sikap pelaksana program ATM Brilink BPNT yang dalam hal ini pendamping BPNT, pemilik Brilink, bank penyalur dan pihak lainnya cukup optimal. Dimana pelaksana kebijakan ini sudah menyadari akan tugas dan tanggung jawab sebagai pelaksana program bantuan pangan non tunai untuk terus memperbaiki program yang dibuat oleh pemerintah menjadi lebih baik, menunjukkan bahwa adanya komitmen dari para pelaksana untuk menjalankan program BPNT, namun untuk dukungan serta komitmen kelurahan Heledulaa, pelaksanaan program BPNT tersebut belum maksimal, terlihat dari sikap kurang teliti dalam mendata masyarakat penerima program BPNT dan juga diungkapkan ada pendampingan tetapi kenyataan dilapangan tidak ada pendampingan dari pendamping sehingganya ada masyarakat yang tidak mengambil bahan pokok makanan tetapi langsung mengambil bantuan secara tunai.

d. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi yang bertugas untuk melaksanakan kebijakan ini memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi juga perlu adanya koordinasi untuk keberhasilan implementasi sebuah kebijakan yang membutuhkan kerja sama dengan banyak pihak yang terlibat dalam sebuah kebijakan. Struktur Birokrasi merupakan suatu badan yang sering terlibat dalam implementasi kebijakan secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil temuan lapangan yang dilihat dari faktor struktur birokrasi sudah dilaksanakan sesuai dengan struktur yang ada, tetapi tidak sedikit masyarakat yang kurang mengetahui tentang struktur birokrasi ini.

Sesuai dengan apa yang di ungkapkan salah satu informan “ saya kurang tahu mengenai struktur organisasinya, yang jelas jika sudah ada bantuannya akan diberitahukan kepada masing-masing KPM.”

Struktur birokrasi merupakan faktor ini sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut Edward (dalam Tahir, 2017:70) menjelaskan bahwa sumber daya untuk mengimplementasikan kebijakan telah mencukupi dan para pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan serta bersedia melaksanakannya. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif maka hal ini akan mengakibatkan sumber daya menjadi tidak aktif dan menghambat jalannya implementasi kebijakan.

Keterkaitan dengan hasil penelitian Hayati (2017), bahwa struktur birokrasi menurut Edwards III yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumberdaya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi sudah memadai untuk bantuan pangan non tunai itu sendiri untuk keberhasilan kebijakan pelaksanaan Program bantuan pangan non tunai, karena setiap pihak yang terlibat pasti memiliki pemikiran untuk selalu berkerja sama untuk tahap penyelesaian. Tetapi tidak sedikit juga masyarakat yang tidak mengetahui tentang struktur tersebut, karena kurangnya informasi dari kelurahan mengenai struktur birokrasinya.

KESIMPULAN

1. Proses Implementasi Program bantuan pangan non tunai di kelurahan Heledulaa Utara Kecamatan Kota Timur sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 26 tahun 2018, akan tetapi yang masih perlu dibenahi, pada tahap persiapan dari pihak kelurahan tidak melakukan pendataan kembali, kemudian penyalurannya masih sering terlambat, dan untuk menetapkan penggantian KPM masih kurang tepat sasaran.
2. Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan dalam implementasi program bantuan pangan non tunai (BPNT) sudah dilaksanakan dengan baik serta sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun yang masih perlu ditingkatkan baik komunikasi yaitu informasi yang kurang jelas terkait penyaluran, sumber daya yaitu sarana dan prasarana untuk penyediaan bahan pangan masih kurang memenuhi kebutuhan masyarakat, disposisi yaitu sikap kurang teliti dalam mendata masyarakat penerima program BPNT, dan struktur birokrasi sudah sesuai dan juga sudah memadai, tetapi tidak sedikit juga masyarakat yang tidak mengetahui tentang struktur tersebut.

DAFTAR REFERENSI

- Abdussamad, Z., Tahir, A., & Arsana, I. K. S. (2021). Analisis Tingkat Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus: Di Gorontalo Utara). *Efisiensi: Kajian Ilmu Administrasi*, 18(1), 45–62. <https://doi.org/10.21831/efisiensi.v18i1.37275>
- Fadlurrohman, I., Nulhaqim, S. A., & Sulastri, S. (2019). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Studi Kasus di Kota Cimahi). *Share: Social Work Journal*, 9(2), 122–129.
- Gultom, H., Kindangen, P., & Kawung, G. M. V. (2021). Analisis pengaruh Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 21(1), 39–53.
- Hamzah, A. (2021). *Penelitian Berbasis Proyek Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R & D Kajian Teoritik & Contoh-contoh Penerapannya*. CV Literasi Nusantara Abadi.
- Handoyo, E. (2012). Kebijakan publik. *Semarang: Widya Karya*.
- Hayati, R. (2017). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Di Desa Garagata Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong. *PubBis: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis*, 1(2), 449–462.
- Igirisa, I., Rahman, M., Abdussamad, J., Abdusamad, Z., & Husain, A. (2020). Implementation of Development Policy for Livestock Farming Business in Gorontalo Regency, Gorontalo, Indonesia. *Systematic Reviews in Pharmacy*, 11(12).
- Kusnadi, I. H., & Baihaqi, M. R. (2020). Implementasi Kebijakan Sistem Online Single Submission (OSS) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Subang. *The World of Public Administration Journal*.
- Siagian, M., Kom, S., Sunargo, S. E., Khoiri, M., Rustam, T. A., & Wasiman, S. E. (2022). *Pengantar Manajemen* (Vol. 1). CV BATAM PUBLISHER.
- Sugiyono, M. (2019). penelitian dan pengembangan Research and development. *Bandung: Alfabeta*.
- Tahir, A. (2017). *Reformasi Birokrasi Birokrasi Kontekstual*. 978–979.
- TuI, F. P. D. (2021). Community Participation in the Implementation of the Function of Water Supervision and Fisheries in the Kabila Bone Region of Gorontalo Province. *ARTIKEL*, 1(8233).